

PENGUATAN EKONOMI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI KOTA MAKASSAR

Sitti Hasbiyah

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar

Email : hasbiahsitti@gmail.com

ABSTRAK

Pengangguran adalah salah satu masalah yang dihadapi semua negara di dunia sebagai akibat dari adanya kesenjangan antara jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja dengan ketersediaan kesempatan kerja. Pengangguran selalu menjadi salah satu dari prioritas masalah yang harus dihadapi dalam setiap perencanaan pembangunan. Keberhasilan pembangunan biasanya diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah seharusnya diikuti dengan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan adanya penciptaan lapangan kerja baru, permintaan tenaga kerja di pasar kerja akan meningkat secara otomatis sehingga angkatan kerja yang ada dapat diserap di dalam pasar kerja. Penyerapan angkatan kerja ini akan berakibat pada penurunan angka pengangguran. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Public Opinion Surveys*. Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 1) Sumber Data Primer, 2) Sumber Data Sekunder. Instrumen penelitian ini merupakan peneliti sendiri, yang dimana peneliti sebagai instrumen untuk mendapatkan data yang akurat dibekali dengan bermacam-macam metode.

Kata Kunci : Pengangguran, Manajemen Pembangunan, Administrasi Publik, Pertumbuhan Ekonomi

STRENGTHENING OF ECONOMY IN THE FIGHT UNEMPLOYMENT IN MAKASSAR

Sitti Hasbiyah

Faculty of Economics, State University of Makassar

Email : hasbiahsitti@gmail.com

ABSTRACT

Unemployment is one of the problems faced by all countries in the world as a result of the gap between the working age population who enter the workforce with the availability of employment opportunities. Unemployment has always been one of the priority issues to be faced in any development planning. The success of development is usually identified with high economic growth. This is because economic growth in a region should be followed by the creation of new jobs. With the creation of new jobs, demand for labor in the labor market will go up automatically so that the existing labor force can be absorbed in the labor market. The absorption of the labor force will result in a decrease in unemployment. This study uses qualitative research. This study uses the approach of *Public Opinion Surveys*. Sources of data in this study include : 1) Primary Data Sources, 2) Secondary Data Sources. This instrument is the researcher's own research, which is where the researcher as an instrument to obtain accurate data supplied by a variety of methods.

Key Words : Unemployment, Development Management, Public Administration, Economic Growth

LATAR BELAKANG

Pengangguran di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dalam pembangunan ekonomi di negara seperti ini pengangguran yang semakin bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit dan lebih serius daripada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan terendah. Keadaan di negara-negara berkembang dalam beberapa dasawarsa ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup mengadakan kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk yang berlaku. Oleh karenanya, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin bertambah serius.

Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

Penelitian Biro Pusat Statistik (BPS) membedakan angkatan kerja menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan atau dapat di sebut sebagai pengangguran terbuka. Pengertian BPS tentang angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (10 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang di maksud bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya tidak bekerja maupun mencari kerja. Mereka adalah penduduk dengan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah dan tidak mampu melakukan kegiatan seperti pensiun atau cacat jasmani. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini sangat boleh jadi masih lebih rendah daripada kenyataan ril yang ada di lapangan. Bisa saja dalam kenyataannya angka pengangguran di Indonesia masih lebih tinggi dari data dan angka resmi itu.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat jumlah pengangguran di Kota Makassar hingga bulan April 2012 mencapai 58.000 orang sehingga menempatkan kota ini pada peringkat kelima kota dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Makassar Manai Soyfan mengatakan dalam setahun terakhir terjadi penurunan angka pengangguran 21,62 % dimana pada tahun 2011 mencapai 74.000 orang. "Meski masih terbilang tinggi, angka pengangguran di Makassar dalam setahun terakhir turun sekitar 21,62 %," klaim Manai. Menurut data Disnakertrans, realisasi penyerapan tenaga kerja menjelang akhir kuartal II/2012 mencapai 6.000 orang. Realisasi penyerapan tenaga kerja itu tersebar pada sejumlah perusahaan swasta maupun instansi pemerintahan di kota ini. Adapun dari pencari kerja yang terdata, rerata didominasi lulusan dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota ini, disusul kemudian tamatan SLTA/SMK sederajat. "Tenaga kerja tersebut sebelumnya merupakan pengangguran yang tercatat sebagai pencari kerja di Disnakertrans. Total jumlah pencari kerja yang terdata tahun sebanyak 12.000 orang, dan yang terserap hingga saat ini 50 % melalui fasilitasi Disnaker," ujarnya, Kamis 5 April 2012. Sebelumnya, pada awal tahun 2012 Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar telah menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) terkait pengadaan bursa kerja online, dengan tujuan mempermudah masyarakat di kota ini mengakses informasi kerja sesuai dengan kualifikasi. Pengadaan bursa kerja online tersebut juga

merupakan salah satu program pemerintah pusat bersama JICA dalam rangka menekan angka pengangguran di seluruh daerah di Indonesia.

Masalah

Dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengangguran di kota Makassar dan penanggulangannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pengangguran

Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas masih banyak istilah arti definisi pengangguran diantaranya :

Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Payman J. Simanjuntak, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja berusia angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan.

Definisi pengangguran berdasarkan istilah umum dari pusat dan latihan tenaga kerja, pengangguran adalah orang yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang meskipun dapat dan mampu melakukan kerja. Definisi pengangguran menurut Menakertrans, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha baru, dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Dalam jurnal Martin Neil Baily (1978) studi pengangguran memberikan kesempatan unik untuk menyelidiki *set point theory* karena kebanyakan orang tetap menganggur untuk jangka waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, sebagian besar orang yang menjadi pengangguran selama penelitian hanya menganggur selama sekitar satu tahun atau kurang. Jika teori *set point* itu benar, ini individu harusnya kembali ke tingkat dasar kepuasan hidup mereka segera setelah mereka menjadi dipekerjakan ulang. Jika pengalaman pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan pada tingkat jangka panjang kesejahteraan bahkan setelah acara selesai dan orang-orang menjadi dipekerjakan kembali, maka ini akan menjadi kuat bukti terhadap *set point theory*.

Tidak hanya di Indonesia tingkat pengangguran yang tinggi telah menjadi ciri tenaga kerja Eropa pasar selama bertahun-tahun, meskipun prioritas tinggi yang melekat pada masalah oleh Komisi Eropa dan pemerintah nasional dan meskipun banyak nasihat kebijakan yang tersedia. Salah satu bagian dari kebijakan saran yang muncul untuk perintah dukungan universal reformasi sistem pajak kerja, dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak pada pengusaha. Misalnya, White Paper Komisi Eropa Pertumbuhan, Daya Saing, Pekerjaan, menyarankan pemerintah untuk "mengatur sendiri target mengurangi biaya tenaga kerja non-upah oleh berjumlah setara dengan 1 % sampai 2 % dari PDB", "dalam rangka untuk membantu menjaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru tanpa mengurangi tingkat upah".

Sebab-Sebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja
Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.

- b. Struktur lapangan kerja tidak seimbang
Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
- c. Meningkatnya peranan dan aspirasi
Angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
- d. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.
Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

Dampak-Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian

Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi, yaitu :

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu negara
Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini :
Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomipun tidak akan terpacu.
2. Dampak pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat
Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya :
 - a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
 - b. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan.
 - c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

Perspektif Manajemen Pembangunan

1. Pengertian Manajemen

Mary Parker Follet misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai jadwal yang direncanakan.

Mary Parker Follett dalam Hani Handoko mendefinisikan manajemen: *as art in finishing work through others*, sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dijelaskan selanjutnya, dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, manajer menggunakan orang lain atau dapat dikatakan para manajer tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi, bisa disimpulkan dalam hal ini bahwa fungsi manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. James AF Stoner dalam Boedyo Supono (2011) memberikan definisi mengenai manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2. Pembangunan

Sukses tidaknya perencanaan pembangunan daerah itu sudah barang tentu tidak bisa terlepas dari media massa di dalamnya. Kenapa seperti itu, karena pemerintah, pers, dan masyarakat adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan satu sama lain (Idawati Pandia, 2008). Secara garis besar, bisa diidentifikasi tiga pola pemikiran dan praktik pembangunan yang berkembang di Indonesia, yang masing-masing menekankan pendekatan berbeda, yaitu penekanan politik, ekonomi, dan moral sebagai panglima.

Menurut Totok Mardikanto : Pembangunan didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat, terutama untuk jangka panjang. Upaya ini dilaksanakan oleh pemerintah yang didukung oleh partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan teknologi yang terpilih. Sedangkan Lionberger dan Gwin mendefinisikan pembangunan sebagai proses pemecahan masalah, baik masalah yang dihadapi oleh aparatur dalam setiap jenjang birokrasi pemerintah, di kalangan peneliti dan penyuluh, atau pun masalah-masalah yang dihadapi warga masyarakat.

3. Konsep Manajemen Pembangunan

Urban Manajemen dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan suatu proses manajemen yaitu mengorganisasikan dan mengkoordinasikan kondisi/sistem kota yang ada saat ini yaitu faktor-faktor produksi didalam kota baik yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, maupun kewiraswastaan (*enterpreunership*) supaya dapat dicapai hasil yang maksimal dan efisien untuk menuju ke arah sistem kota yang dikehendaki berdasarkan pada tujuan ideal dan dinamis.

Administrasi Publik

Administrasi publik dari masing-masing negara memiliki sejumlah fitur tertentu cara hal-hal yang dilakukan, yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Selain itu,

dalam setiap administrasi ada banyak lembaga dengan karakteristik khas mereka sendiri: lokal, provinsi atau regional, nasional dan bahkan lembaga transnasional (dalam Dr. Enrique Claver, Dr. Juan Llopis dan Dr. José L. Gascó, 2000). Kebanyakan teori administrasi publik (Frederickson 1997; Perry dan Wise 1990 dalam Wouter Vandenabeele, 2007) mengidentifikasi perilaku tersebut seperti pengorbanan diri dalam menyadari kepentingan publik dan altruisme sebagai kekhasan pegawai negeri dan sangat sulit untuk menjelaskan jenis perilaku dalam hal pilihan rasional (Wouter Vandenabeele, 2007).

Peran yang tepat dari masyarakat dalam administrasi publik telah menjadi area aktif dan berkelanjutan pada penyelidikan, eksperimen, revolusi, dan kontroversi sejak kelahiran bangsa ini. Kontemporer gerakan untuk menguji peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif telah datang sebagai tanggapan terhadap masalah di paruh kedua abad ini dan sebagai akibat dari kekhawatiran pada bagian dari warga, administrator, dan politisi lebih pada keputusasaan warga dan apatis (Box, 1996; Putnam, 1995, Timney, 1996; Thomas, 1995 dalam Cheryl Simrell King, Kathryn M. Feltey dan Bridget O'Neill Susel, 1998). Karena kedua hal warga dan para pemimpin mereka telah menyadari, "partisipasi melalui saluran kelembagaan normal memiliki sedikit hal yang berdampak pada substansi politik pemerintah" (Crosby, Kelly, dan Schaefer, 1986 dalam Cheryl Simrell King, Kathryn M. Feltey dan Bridget O'Neill Susel, 1998). Banyak warga, administrator, dan politisi tertarik dalam meningkatkan keputusan partisipasi publik dalam masyarakat. Upaya untuk melakukannya saat ini sedang berlangsung di seluruh negeri (Cheryl Simrell King, Kathryn M. Feltey dan Bridget O'Neill Susel, 1998).

Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian konsep pembangunan yang paling mudah dan populer ialah kemakmuran ekonomi. Kemakmuran ekonomi dihubungkan dengan taraf kehidupan yang lebih baik, terutamanya dari segi akumulasi modal dan kekayaan sebuah negara. Negara yang kaya-raya dianggap sebagai negara yang makmur. Kemakmuran ekonomi sebuah negara dinilai dari segi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara tersebut dari masa ke masa. Jika kadar pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu meningkat dari tahun ke tahun, ini bermakna bahwa pembangunan adalah pesat di negara tersebut. Ringkasnya, pertumbuhan ekonomi adalah penting kepada pembangunan. Malah, pembangunan itu sendiri boleh diukur berdasarkan sejauh mana kadar pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh sebuah negara dari masa ke masa.

Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan dua kepentingan dalam proses pembangunan di sebuah negara. Peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi bermakna *size* ekonomi di sebuah negara bertambah. *Size* ekonomi yang bertambah besar merujuk kepada suatu skala aktivitas ekonomi yang semakin meluas di dalam semua sektor. Ini bermakna lebih banyak peluang pekerjaan dapat diwujudkan dari masa ke masa. Kewujudan peluang-peluang pekerjaan yang berterusan dapat membantu sebuah negara mencapai tahap guna tenaga penuh. Jika tahap ini dapat dicapai, maka sudah pasti tidak wujud lagi masalah seperti pengangguran di kalangan penduduk sebuah negara. Secara umum, apabila tiada pengangguran bermakna tidak ada lagi kemiskinan. Oleh itu, satu daripada matlamat utama pembangunan, adalah untuk menghapuskan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan pendapatan atau kadar upah para pekerja. Kenyataan tersebut dibuat kerana pertumbuhan ekonomi merujuk kepada pertambahan pengeluaran barangan dan perkhidmatan dalam sebuah sistem ekonomi. Pengeluaran pula dapat ditingkatkan dengan meningkatkan produktiviti para pekerja. Produktivitas yang meningkat bermakna lebih banyak keuntungan bakal diperoleh, dan secara langsung membolehkan kadar upah dinaikkan. Kenaikan kadar upah akan

menyebabkan kenaikan kuasa ben. Upah yang tinggi dan mencukupi membolehkan penduduk mendapatkan segala keperluan kehidupan (sekiranya kadar inflasi senantiasa rendah). Oleh itu, satu lagi matlamat pembangunan adalah untuk menyediakan keperluan kehidupan yang mencukupi untuk setiap penduduk.

Ada beberapa faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi tidak akan berlaku sekiranya sumber ekonomi yang tersedia ada tidak ditambah. Sumber ekonomi yang penting ialah modal, tanah, sumber daya manusia, sumber tenaga, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Lebih banyak sumber tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah sistem ekonomi, lebih banyaklah aktivitas pengeluaran dapat dijalankan. Aktivitas pengeluaran pula dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan baru dapat pula menambahkan kuasa beli di kalangan anggota sebuah masyarakat. Peningkatan kuasa beli menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap barangan, sama ada barangan dan permintaan yang selalu ada, ataupun barang dan permintaan baru, misalnya rekreasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis pengentasan pengangguran pada Kota Makassar. Berdasarkan jenis penelitiannya yang dimana menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada penelitian ini dibuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998). Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

1. Sumber Data Primer.
2. Sumber Data Sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara Individual (*Individual Interview*).
2. Pengamatan Terlibat (*Participant Observation*).
3. Dokumentasi.

PEMBAHASAN

Cita-cita Sulawesi Selatan berperan dalam pentas ekonomi dunia bukan sekadar wacana. Sepanjang 2010, provinsi ini agresif membuka diri pada perdagangan dunia dan dilirik sejumlah investor dari Asia, Afrika dan Eropa. Malaysia, Singapura, India, China dan Swiss, bukan hanya satu atau dua kali saja datang menjajaki berbagai peluang investasi terutama di bidang pertanian dan industri ke daerah ini, baik atas nama pemerintah maupun atas nama perusahaan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan mencatat perusahaan bernama Radhee Group asal Gujarat, India, yang bergerak di sektor perkebunan, tambang dan peternakan, melirik potensi rempah-rempah yang ada di Sulawesi Selatan untuk kemungkinan ekspor ke negaranya dalam jumlah besar. Setelah beberapa bulan penjajakan, perusahaan ini kemudian menanamkan investasinya sebesar satu juta dolar Amerika dengan mengambil alih industri pengolahan bijih besi di Kabupaten Bonedan sebesar Rp. 500 miliar pada industri semen dengan memasok batu kapur di Kabupaten Maros.

Rombongan pengusaha India lainnya juga menyatakan minatnya pada potensi batu bara di Sulawesi Selatan yang dinilai belum tergarap secara maksimal, karena

memiliki kandungan sulfur tinggi dan nilai kalorinya rendah. Duta Besar Indonesia untuk India, Andi Muhammad Ghalib yang mendampingi rombongan pengusaha asal India, mengatakan, para pengusaha tersebut tertarik untuk mengolahnya dengan teknologi yang mereka miliki.

Malaysia melalui perusahaan Felda Palm Industries pada Juni 2010 pernah menyatakan akan mulai membeli rumput laut Sulawesi Selatan. Kerja sama dilakukan karena Sulawesi Selatan diketahui sebagai produsen rumput laut terbanyak ketiga dunia dan terbanyak di Indonesia, sementara di Malaysia kekurangan dan hanya didukung oleh Sabah sebagai daerah produsen rumput laut di negeri jiran itu. Malaysia membutuhkan sebanyak 12 ribu ton rumput laut per tahun untuk bahan makanan jadi dan non makanan. Data terakhir Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan produksi pada 2010 sebanyak 845.480 ton dan sebanyak satu juta ton pada 2013.

Dari Afrika, pemerintah Nigeria berminat mengimpor beras Sulawesi Selatan karena produksi beras negara tersebut belum mencukupi kebutuhan masyarakatnya. *Turakin Bade Ambassador Embassy of Nigeria*, Ibrahim Mai Sule menyampaikan kepada Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang, bahwa kebutuhan beras masyarakat Nigeria cukup besar. Selama ini kebutuhan beras di negara Nigeria ditutupi dengan cara mengimpor dari Thailand.

Wakil Gubernur mengatakan, Sulawesi Selatan siap mengekspor beras ke Nigeria dan akan memfasilitasi pengurusan izin ekspor ke Kementerian Pertanian karena ekspor beras membutuhkan regulasi khusus dari pemerintah pusat. Tidak hanya beras, petani dan peneliti asal Nigeria, Ghana, Kamerun dan Pantai Gading melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan karena tertarik dengan pengolahan kakao Sulawesi Selatan yang sangat pesat. Mereka melakukan kunjungan ke lokasi perkebunan kakao di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, A. Muallim menjelaskan, produksi kakao dilakukan hampir di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Kapasitas produksinya sebesar 140 ribu ton per tahun, dan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk sekitar 7,7 persen. Tingkat produksi ini diharapkan meningkat dua kali lipat hingga 300 ribu ton pada akhir 2010.

Tidak hanya menunggu, pada berbagai kesempatan, Sulawesi Selatan juga melakukan penawaran secara langsung kepada investor-investor potensial seperti salah satu industri coklat terbesar di Asia, Nestle, dengan menyatakan kesiapannya menerima industri tersebut jika ingin membangun pabriknya di Sulawesi Selatan, menyusul kabar perpindahan pabrik industri coklat tersebut dari Singapura.

Keagresifan Sulawesi Selatan juga ditunjukkan dengan berupaya melayani calon investor dengan baik. Salah satunya dengan mengupayakan izin ekspor daging sapi ke Malaysia dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulawesi Selatan, Murtala Ali mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki kemampuan memasok daging ke Malaysia hingga 50 ribu ton per tahun, meski daerah ini masih memiliki terkendala pada kapasitas kemampuan pemotongan hewan.

Sulawesi Selatan pada Forum Ekonomi

Sulawesi Selatan juga menunjukkan keagresifannya pada forum-forum ekonomi. Dalam rapat koordinasi bersama 18 atase perdagangan Indonesia di Makassar, 8-9 Maret 2010, Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengharapkan berbagai komoditas yang dimiliki Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi lumbung nasional saja, tapi juga dapat menjangkau perdagangan internasional. Atase perdagangan dan perwakilan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) diminta dapat mengoptimalkan fungsinya menjembatani perdagangan luar negeri.

“Sulawesi Selatan siap menerima permintaan dari atase perdagangan dan memasok kebutuhan negara-negara yang membutuhkan komoditas yang kita miliki”, kata gubernur. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan, Amar Kadir selama ini ekspor Sulawesi Selatan hanya terfokus pada negara-negara di Benua Amerika dan Asia. Padahal, sumbangan nilai ekspor dari negara di Timur Tengah dan Afrika terhadap nilai ekspor nasional cukup besar.

Ia meyakini kerjasama ini akan menarik investor untuk mendirikan industri pengolahan komoditas sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Koordinasi yang pertama digelar di Indonesia ini merupakan tindak lanjut dari presentasi peluang investasi Gubernur Sulawesi Selatan di depan 40 dubes asing untuk Indonesia di Jakarta 14 Oktober 2009. Keterbukaan Sulawesi Selatan juga dinyatakan pada forum *International Enterprise Singapore (IES)* untuk memenuhi kebutuhan dasar Singapura. "Kita memiliki sumber daya alam yang banyak, namun masih membutuhkan investasi pengembangan infrastruktur memadai, teknologi dan sumber daya manusia yang cukup," ujarnya saat menjamu *International Enterprise Singapore (IES)*.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menawarkan sinergitas antara sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Selatan dengan investasi, teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki Singapura sambil menjanjikan rekomendasi dan jaminan terhadap setiap investasi yang masuk. Menurut dia, berbagai komoditas yang dimiliki Sulawesi Selatan membutuhkan sentuhan pengusaha untuk membuat pasar komoditas semakin bernilai tambah.

Organisasi pengusaha di Singapura yang kegiatannya adalah memediasi investor yang berminat berinvestasi di Indonesia ini menunjukkan ketertarikannya pada agribisnis, pengolahan makanan, terutama jalur transportasi pada proses masuk dan keluar barang dari dan keluar Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan dan Singapura melalui IES menandatangani kerja sama ekspor sejumlah komoditas untuk diekspor langsung ke Singapura. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Agus Arifin Nu'mang mengatakan dengan kerja sama ini, ekspor komoditas Sulawesi Selatan ke Singapura tidak perlu lagi melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Selain memerlukan biaya tinggi, jalur ekspor melalui Surabaya membuat kualitas komoditas ekspor menjadi buruk karena tersimpan lama di pelabuhan. Pemerintah Singapura juga menawarkan kerja sama dengan industri pengolahan cokelat, kopi, dan perikanan dengan mengharapkan pasokan bahan baku secara rutin dari Sulawesi Selatan. Kerja sama ini dilakukan karena pemerintahnya menilai, Sulawesi Selatan merupakan penghasil komoditas agro terbesar di Indonesia.

Apa yang dilakukan Sulawesi Selatan selama ini sedikit banyak cukup menjawab harapan yang diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar pada KTI Expo dan Forum Oktober 2010. Ia meminta Sulawesi Selatan mengubah visinya sebagai titik penting di wilayah ASEAN bahkan Asia Pasifik dan bukan lagi hanya menjadi pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Menurut dia, langkah strategi mengubah visi tersebut akan memberi kesempatan KTI secara keseluruhan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di kawasan Asia Pasifik.

Jakarta, katanya, sudah sulit memenuhi visi tersebut karena secara geografis lokasinya sebagai akhir dari tujuan. "Jika melihat peta Asia, lagi-lagi Ibu Kota Sulawesi Selatan ada di tengah-tengah," ujarnya. Pada berbagai kesempatan Sulawesi Selatan harus dapat memanfaatkan berbagai forum untuk mempresentasikan posisi strategisnya dan bukan hanya mengharapkan pemerataan pembangunan dengan kawasan barat tapi juga mensubsidinya.

Ia juga meminta Sulawesi Selatan mengarahkan investasi untuk memperoleh nilai tambah, bukan hanya mengeksploitasi sumber daya alam. Ia menilai, pemerintah

daerah di kawasan timur Indonesia khususnya Sulawesi Selatan membutuhkan keseriusan dan komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan satu per satu persoalan pada industri dan komoditas. "Kita jangan terpaku dengan *masterplan* yang ada, kita harus mengandalkan daya dan kapasitas daerah yang kemudian didukung pusat tidak sebaliknya," ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah tidak selalu melihat regulasi sebagai hambatan, namun melihat kemungkinan dari sisi bisnisnya. "Sulawesi Selatan punya kapasitas bisnis itu tapi memang harus didorong terus," katanya. Setelah menjadi tuan rumah bagi kemajuan ekonomi dan investasi di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Selatan dipercaya menjadi tuan rumah dari pertemuan Brunei Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina-East ASEAN Growth Area pada November 2010.

Isu krisis pangan dunia yang menjadi pokok bahasan dalam pertemuan ini dimanfaatkan Sulawesi Selatan dengan menyatakan kesiapannya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pasokan pangan dunia. Kesuksesan Sulawesi Selatan di bidang agribisnis lagi-lagi menjadi alasan *The First BIMP-EAGA Agricultural Minister Meeting* tersebut yang diselenggarakan di Makassar selain karena Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, merupakan *Chief Local Government Unit* dari seluruh provinsi di BIMP-EAGA.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan nilai ekspor negara-negara yang tergabung dalam BIMP-EAGA mencapai lebih dari 50 miliar dolar AS. Kondisi ini menunjukkan peran penting negara-negara forum sebagai pemain utama dunia dalam banyak komoditas ekspor dan dalam pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara. Dalam sepuluh tahun terakhir negara-negara tersebut telah menjadi produsen sebagian besar komoditas pangan dan agrikultur. Berdasarkan potensi yang dimiliki tersebut, para pemimpin negara dalam BIMP-EAGA mengadopsi konsep yang dikenal sebagai lumbung pangan atau *food basket* untuk wilayah Asia Tenggara dan Asia.

Sektor agrikultur dan perikanan memiliki peranan signifikan memberikan kontribusi pada pembangunan saat ini dan pada masa depan kerja sama antara negara BIMP-EAGA untuk mengentaskan kemiskinan dan pencapaian target MDG`s. Selain potensi komoditas, negara-negara forum juga memiliki potensi lokasi strategis dan akses untuk pasar ASEAN dan untuk wilayah utara Asia, Asia Tenggara dan Timur Tengah. Indonesia sendiri, katanya, sudah sangat siap dengan konsep lumbung pangan yang dibahas dalam pertemuan BIMP-EAGA.

Layanan Investasi

Sebagai daerah yang pernah berperan sebagai pusat perdagangan di kawasan Asia Pasifik, Sulawesi Selatan terus berbenah diri dengan memperbaiki fasilitas dan infrastruktur pendukung perannya pada ekonomi dunia di masa kini. Mulai 1 Desember 2010 sistem investasi di Sulawesi Selatan tidak akan jauh berbeda dengan berbelanja di supermarket dengan beroperasinya layanan perizinan terintegrasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Perizinan yang dilayani mulai dari Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha hingga surat izin penanaman modal dari pusat. Calon investor yang akan menanamkan modalnya di Sulawesi Selatan tidak lagi mengurus sendiri perizinannya mulai dari Makassar hingga ke Jakarta.

Pada tahap awal, PTSP melayani perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri dan secara bertahap akan mengambil alih pelayanan perizinan Penanaman Modal Asing bila telah mendapat kepercayaan pemerintah. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran Rp. 300 juta yang dialokasikan pada APBD perubahan 2010 Sulawesi Selatan untuk jasa pihak ketiga layanan PTSP. Selain itu pihaknya juga berencana membangun menara BKPM untuk memaksimalkan pelayanan investasi satu atap yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Menara yang membutuhkan dana pembangunan sekitar Rp. 25 miliar tersebut akan dibangun di atas lahan dekat dengan Mal Panakukang. Lokasi tersebut dinilai cukup strategis karena berada di kawasan bisnis Makassar. Gubernur pada berbagai kesempatan selalu mengajak seluruh pihak untuk selalu siap menerima dan melayani investor dengan baik. Ia mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk semakin membuka diri kepada investor. "Pembangunan ekonomi kita membutuhkan dorongan investasi, dukungan regulasi dan infrastruktur pendukung yang memerlukan dana yang sangat besar," katanya pada Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia yang digelar di Tampak Siring, Bali, 19-21 April 2010.

Keterbukaan dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. "Kita tidak bisa terus menunggu dari APBN yang paling penting adalah jaminan pemerintah," ujarnya yang terlibat sebagai salah satu tim perumus ekonomi dalam rapat tersebut. Meski secara keseluruhan belum terealisasi dalam bentuk investasi nyata, namun upaya-upaya penajakan dan minat para investor asing tersebut dapat menjadi ukuran bahwa Sulawesi Selatan memang memiliki kemilau dengan segala sumber daya alam dan potensi yang dimilikinya.

Sulawesi Selatan selalu menunjukkan keoptimisannya meski masih terkendala dari sisi infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam bekerja sama dengan investor selain beberapa regulasi pemerintah pusat yang masih membutuhkan penyesuaian untuk mendukung terciptanya iklim investasi dan peluang ekspor yang besar. Sulawesi Selatan berada di peringkat enam nasional nilai penanaman modal asing terbanyak hingga September 2010 berdasarkan peringkat realisasi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan, Irman Yasin Limpo menjelaskan, hingga nilai PMA Sulawesi Selatan mencapai 439,7 juta dolar AS atau memberikan kontribusi sebesar 3,6 persen pada PMA nasional. Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan signifikan bila dibanding pencapaian 2009 yang mencapai sekitar 77 juta dolar AS. Sementara itu, nilai Penanaman Modal Dalam Negeri mencapai Rp1,059 triliun atau menurun dibandingkan 2009 yang mencapai Rp1,137 triliun.

REFERENCES

- Alwi (2006). *Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah*, Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan, Volume 3, Nomor 1, Januari-April 2006.
- Boedyo Supono (2011). *Peranan Modal Sosial dalam Implementasi Manajemen dan Bisnis*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 11, No. 1, April 2011.
- Bambang dan Muntiani (2012). *Sistem Informasi Manajemen Praktik Kerja Lapangan pada Program Studi Sistem Informasi Berbasis Web*, Seruni FTI UNSA 2012 Volume 1 ISSN: 2302-1136.
- Cheryl Simrell King, Kathryn M. Feltey dan Bridget O'Neill Susel (1998). *The Question of Participation : Toward Authentic Public Participation in Public Administration*, Public Administration Review, Vol. 58, No. 4. (Jul-Aug, 1998), pp. 317-326.
- C. Pissarides (1997). *The Impact of Employment Tax Cuts on Unemployment and Wages : The Role of Unemployment Benefits and Tax Structure*, London School of Economics and Political Science 1997.
- Dr. Enrique Claver, Dr. Juan Llopis dan Dr. José L. Gascó (2000). *Public Administration : from a Bureaucratic Culture to a Citizen-Oriented Culture*, Business Management at the University of Alicante, Spain 2000.

- Hadi Sasana (2011). *Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2011, Vol. 18, No. 1, ISSN: 1412-3126.
- Idawati Pandia (2008). *Opini Publik Mengenai Peran Media Cetak Lokal dalam Pembangunan Bidang Pertanian Hortikultura (Survei di Desa Ndokum Siroga dan Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo)*, BBPPKI Medan, 2008.
- Juki Anto (2013). *Definisi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi*, <http://juckyejuckyeanto.blogspot.com/>.
- Liao Hui dan Achia Chuang (2004). *A Multilevel Investigation Of Factors Influencing Employee Service Performance and Customer Outcomes*, Academy of Management Journal 2004, Vol. 47, No. 1, 41-58.
- Martin Neil Baily (1978). *Some Aspects of Optimal Unemployment Insurance*, Journal of Public Economics 10 (1978) 379-402. © North-Holland Publishing Company.
- Mochamad, dkk (2012). *Pembangunan Media Pembelajaran Teknik Komputer Jaringan Kelas X Semester Ganjil di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Bangsa Pati Berbasis Multimedia Interaktif*, Indonesian Journal on Computer Science Speed (IJCSS) 13 FTI UNSA Vol 9 No 3-Desember 2012-ejournal.unsa.ac.id.
- Purbayu dan Retno (2005). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol. 2 No. 1 / Juli 2005: 9 – 18.
- Rofiuddin Mohammad (2012). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur Dalam Era Otonomi Daerah Tahun 2005-2009*, Jurnal Publikasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.
- RM Riadi dan Caska (2008). *Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antardaerah di Provinsi Riau*, Jurnal Industri dan Perkotaan Volume XII Nomor 21, Februari 2008.
- Redatin, dkk (2012). *Dampak Penyelenggaraan Perlombaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kalimantan Barat (Studi di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya)*, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013.
- Salanova Marisa and Sonia Agut (2005). *Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty : The Mediation of Service Climate*, Journal of Applied Psychology 2005 American Psychological Association, Vol. 90, No. 6.
- Wouter Vandenberghe (2007). *Towards a Public Administration Theory of Public Service Motivation : an Institutional Approach*, Public Management Institute, Katholieke Universiteit Leuven.